

Kode:

PROPOSAL PENELITIAN

**BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PRODI
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2019**



**PEMETAAN PERBANKAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MEMACU PERTUMBUHAN SEKTOR RIIL YANG TERPINGGIRKAN
DI WILAYAH REGIONAL EKS KARESIDENAN BESUKI**

Disusun Oleh :

**Nurul Setianingrum, S.E, M.M
Nur Hidayat , S.E, M.M**

(IAIN JEMBER)

**PEMETAAN PERBANKAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMACU
PERTUMBUHAN SEKTOR RIIL YANG TERPINGGIRKAN
DI WILAYAH REGIONAL EKS KARESIDENAN BESUKI**

Abstrak

Persoalan kesenjangan dan pemerataan pembangunan memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar deretan angka. Hal ini berhubungan erat dengan masalah keadilan, keterbukaan informasi, serta pemerataan kesempatan dan akses dari sebuah proses perubahan yang bernama pembangunan. Setiap Kepala daerah harus memiliki kemampuan melihat sektor yang memiliki keunggulan dan kelemahan di wilayahnya guna menentukan sektor sektor yang mempunyai prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor – sektor lain jugatumbuh. Kabupaten Jember dan Bondowoso, terletak di Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang menjadi barometer ekonomi di Indonesia. Penelitian deskriptif ini menggunakan dianalisa dengan Model Location Quotient dengan data dasar berupa PDRB 2 kabupaten obyek dan data berupa nilai realisasi pinjaman seluruh perbankan di keempat wilayah obyek di 9 sektor pembangunan.

Kata kunci :*Kesenjangan, Location Quotient, Sektor Unggulan*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan, salah satunya sinkronisasi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau disebut dengan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terbesar di dunia. Kondisi ini membuat pulau-pulau dan wilayah yang jauh dari Jawa atau Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki konsekuensi kurang perhatian dari pemerintah khususnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, seperti infrastruktur, keamanan, kesehatan dan pendidikan.

Penetapan Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menjadi daerah otonom berarti semua proses pengembangan daerah mulai perencanaan, eksekusi hingga kontrol dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini membawa konsekuensi sangat besar terhadap kepala daerah untuk menjadi perancang dan pemasar daerah yang mumpuni.

Otonomi pengelolaan daerah ini seyogyanya dimanfaatkan para kepala daerah untuk benar benar mengarahkan kebijakannya hanya untuk tujuan kemaslahatan umat, sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw yang berbunyi: *"Jika amanat telah disia-siakan tunggu saja kehancuran akan terjadi."* Ada seorang sahabat bertanya : *"bagaimana maksud amanat disia-siakan ?"*. Nabi menjawab :*"Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya"*(HR Buchori). Manusia hadir di muka bumi telah diserahi amanah untuk berperan sebagai khalifah yang wajib membangun dan memelihara kehidupan di dunia berdasarkan aturan dan hukum Pemberi Amanah, yaitu Allah SWT. *"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."* (QS Al-Ahzab 72).

Berdasarkan pertimbangan Firman Allah SWT dan Hadist Nabi Saw tersebut, segenap Kepala Pemerintahan Daerah harus mampu mengurangi dan mengatasi tingkat

kesenjangan di daerahnya. Sejalan dengan cita-cita besar bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akumulasi kesenjangan di Indonesia terus meningkat mulai dari kesenjangan pendapatan, kesenjangan kesempatan dan kesenjangan antar wilayah.

Merujuk pada kondisi kesenjangan di Indonesia saat ini. Apa yang terjadi bukan hanya kesenjangan di tingkat pendapatan, melainkan juga kesenjangan dalam hal akses, kesempatan, dan kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kesenjangan, baik ekonomi maupun sosial, biasanya ada dalam beragam bentuk, seperti dalam bentuk kelas, peringkat, kekayaan, pendapatan, serta kewarganegaraan (Galbraith, 2016).

Dalam konteks ekonomi, tingkat kesenjangan yang tinggi berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Menurut Galor (2004) bahwa kesenjangan yang lebar menghilangkan kemampuan kelompok masyarakat miskin untuk tetap sehat dan mengakumulasi modal fisik dan modal manusia. Carvalho (2014) berpendapat bahwa kesenjangan yang terlalu lebar, akibat akumulasi dan konsentrasi pendapatan pada segelintir pihak, juga dapat mengurangi permintaan agregat dan menurunkan tingkat pertumbuhan. Kelompok masyarakat terkaya sebenarnya berbelanja lebih sedikit dibanding masyarakat kelas menengah dan miskin.

Kesenjangan pendapatan membuat orang miskin tidak memiliki banyak asset dibandingkan orang kaya. Karena terjadi kesenjangan distribusi asset, orang miskin tidak bisa menggunakan assetnya sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari institusi keuangan. Padahal, layanan kredit juga dapat mempengaruhi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan transfer pendapatan. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi makro, meningkatkan input produktif, menggerakkan aktivitas produksi, serta mengembangkan usaha baru (Sastra Eka, 2017)

Dalam studi Chatterjee (1994) mengungkapkan bahwa dengan adanya keterbatasan akses terhadap kredit, eksploitasi peluang investasi ikut tergantung dan menjadi terbatas, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mencapai tingkat optimal. Dalam hal ini, orang-orang miskin tidak akan memiliki akses ke pasar kredit. Oleh karena itu

mereka cenderung mengabaikan hal-hal yang sangat esensial untuk pengembangan modal manusia pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan kata lain orang miskin hanya bisa membiayai kebutuhan dasar, seperti menyekolahkan anak, melalui pinjaman sesama rekan atau keluarganya. Dalam jangka panjang, karena masyarakat miskin tidak bisa memberikan pendidikan yang memadai bagi anak-anaknya, permintaan total dalam ekonomi menjadi lebih rendah.

Lembaga keuangan berfungsi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, sebagaimana kita pahami bersama bahwa perputaran uang sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor ekonomi. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) mempunyai fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dalam bentuk tabungan dan menyalurkan ke masyarakat yang defisit dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Karena itu lembaga keuangan menjadi salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara.

Di sisi lain Kepala Daerah sebagai pengambil kebijakan harus memperhatikan pertumbuhan dan stabilitas berbagai sektor guna mengurangi jurang kesenjangan, salah satunya sektor ekonomi yang terdiri atas sembilan sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian, sektor pertambangan, sektor perindustrian, sektor listrik, gas dan air, sektor konstruksi, sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor jasa dunia usaha, sektor sosial/masyarakat dan lain-lainnya.

Untuk itu perlu dilakukan perencanaan dan evaluasi guna tercapainya harmonisasi dan kolaborasi Pemerintah Daerah dan Lembaga keuangan khususnya perbankan untuk pembangunan berkelanjutan di masing masing wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan, kesenjangan akses dan kesenjangan kesempatan menuju keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bondowoso, sebagai objek penelitian merupakan 2 wilayah kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang secara posisi sering sebagai wilayah “*tapal kuda*” (Wibisono & Haryono, 2016) dan didiami oleh mayoritas masyarakat pendhalungan. Dalam tata kehidupan sosial masyarakat Tapal Kuda yang merupakan percampuran dari beragam etnis. Masyarakat ini dikenal dengan istilah

pendhalungan. *Pendhalungan* dapat didefinisikan dengan sederhana sebagai (1) sebuah percampuran antara budaya Jawa dan Madura dan (2) masyarakat Madura yang lahir di Jawa dan beradaptasi dengan budaya Jawa (Yuswadi, 2005). Secara ekonomi, potensi keempat Kabupaten ini hampir sama dengan pemanfaatan sektor pertanian dan agribisnis, perkebunan, kelautan, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata seperti disajikan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1
Rata - Rata PDRB Per sektor Menurut Lapangan Usaha dari 4 Kabupaten Tahun 2011 - 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

SEKTOR EKONOMI	Banyuwangi	Jember	Situbondo	Bondowoso
Pertanian,Perternakan,Kehutanan & Perikanan	13.581.237	12.103.106	3.377.822	3.249.691
Pertambangan	3.436.937	1.672.136	178.542	227.021
Industri, Pengolahan	4.549.070	8.253.748	1.561.886	2.269.094
Listrik,Gas & Air Bersih	22.387	20.708	4.856	5.207
Konstruksi	4.363.333	2.581.494	506.232	810.809
Perdagangan, hotel ,Restauran	55.424.659	4.820.094	1.524.568	1.511.755
pengangkutan & Komunikasi	1.942.987	2.613.880	496.402	577.936
Keuangan,Real State jasa perusahaan	596.596	549.270	153.568	122.291
Jasa Lainnya	471.189	481.130	217.998	184.882
TOTAL	84.388.395	33.095.566	7.829.442	8.958.686

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto 4 Kabupaten Tahun 2011 – 2015 diolah

Dari sektor – sektor ekonomi yang dikembangkan masing-masing kabupaten dengan mengacu pada potensi yang dimiliki, menarik perhatian lembaga keuangan untuk berpartisipasi menyokong perkembangan sektor unggulan daerah. Penyaluran dan distribusi pembiayaan atau kredit diharapkan bisa lebih mendorong iklim investasi dan meningkatkan geliat ekonomi setiap daerah. Namun kebijakan lembaga keuangan dalam hal ini perbankan setiap daerah berbeda-beda

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk menganalisis **“Pemetaan Perbankan Dan Pemerintah Daerah Dalam Memacu Pertumbuhan Sektor Riil Yang Terpinggirkan Di Wilayah Regional Eks Karesidenan Besuki**

(Jember & Bondowoso)”, yang terdiri dari 2 Kabupaten di Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi yang menjadi indikator Pembangunan Ekonomi di Indonesia.

Dengan membandingkan total pembiayaan perbankan berdasarkan sektor ekonomi per Kabupaten yang menjadi obyek penelitian dengan hasil pengembangan sektor ekonomi persektornya yang menggunakan metode LQ sebagai acuan sektor basis dan non basis pada Industri perbankan di masing masing Kabupaten tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Jember dan Bondowoso memetakan sektor riil yang menjadi sektor unggulannya ?
2. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dan Perbankan dalam menangani sektor riil yang masih terpinggirkan dan belum mendapatkan perhatian ?
3. Bagaimana bentuk sinergi Pemerintah Daerah dan Perbankan dalam mengurai kesenjangan pendapatan, kesenjangan akses, dan kesenjangan kesempatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan dan memetakan sektor riil menjadi sektor unggulan di 2 kabupaten eks karisedanan Besuki (Jember dan Bondowoso)
2. Untuk mendeskripsikan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dan perbankan dalam menangani sektor riil yang masih terpinggirkan dan belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dan Perbankan.
3. Untuk mengeksplorasi bentuk sinergi Pemerintah Daerah dan Perbankan dalam mengurai kesenjangan pendapatan, kesenjangan akses, dan kesenjangan kesempatan di wilayah Jember dan Bondowoso.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti di bidang yang sama;

- b. Memberikan wawasan ilmiah dan dapat menjadi sarana pengembangan pengetahuan di bidang perencanaan wilayah dan pengentasan kemiskinan.
2. Kontribusi Praktis
- a. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjadi bahan untuk evaluasi pembangunan dan perencanaan ekonomi di wilayah regional eks karesidenan Besuki khususnya Jember dan Bondowoso
 - b. Sebagai dasar pertimbangan pihak perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan tepat sasaran kepada sektor – sektor riil yang menopang pembangunan di wilayah 2 kabupaten obyek penelitian.
 - c. Bagi Prodi Perbankan syariah membantu memetakan permasalahan terkait kendala (akad dan bimbingan teknis aplikasi akad) perbankan dalam memberikan pembiayaan di sektor tertentu yang bisa disiapkan menjadi materi pelatihan untuk SDM perbankan.
 - d. Untuk Institusi IAIN Jember bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuka program studi (Prodi) yang berbasis pada sektor unggulan Jember dan kabupaten disekitarnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Pada bagian ini peneliti harus menentukan variabel secara jelas dan tegas. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Darmawan, 2014)

Variabel penelitian ini di bagi dua variabel yaitu, variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dengan uraian sebagai berikut:

- a. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah:

Pengembangan Sektor Ekonomi Kabupaten Jember dan Bondowoso.

- b. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah:

Pembiayaan Sektor Ekonomi Industri Perbankan Kabupaten Jember dan Bondowoso.

2. Indikator Variabel

Setelah variabel penelitian terpenuhi, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan indikator-indikator variabel yang merupakan rujukan empiris dari variabel yang akan diteliti.

- a. Indikator Pengembangan Sektor Ekonomi Kabupaten Jember dan Bondowoso adalah sebagai berikut:
 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jember dan Bondowoso (Juta Rupiah), tahun 2011-2017.
 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jember dan Bondowoso (Juta Rupiah), tahun 2011-2017.
 3. Sembilan sektor ekonomi berdasarkan lapangan usaha yaitu: Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Konstruksi, perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa.
- b. Indikator Pembiayaan Perbankan Sektor Ekonomi Industri Perbankan Kabupaten Jember-Bondowoso adalah sebagai berikut:
 1. Pinjaman Yang Diberikan Rupiah Dan Valuta Asing Bank Umum Dan BPR Per Dati II Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Kabupaten Jember dan Bondowoso (Juta Rupiah), tahun 2012-2016.
 2. Sektor Ekonomi berdasarkan lapangan usaha meliputi sembilan sektor yaitu: Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Konstruksi, perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa.

1.6 Definisi Operasional

Berdasarkan indikator empiris variabel penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan definisi operasionalnya. Definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.

Adapun penelitian yang berjudul Pemetaan Perbankan Dan Pemerintah Daerah Dalam Memacu Pertumbuhan Sektor Riil Yang Terpinggirkan Di Wilayah Regional Eks Karesidenan Besuki akan dijelaskan makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut.

1. Pemetaan

Pada 1933, Walter Christaller memperkenalkan “Teori Tempat Sentral (*central place theory*)”, untuk menjawab pertanyaan apa yang menentukan jumlah, besar, dan persebaran kota. Teori ini memperkenalkan tiga prinsip struktur heksagonal : pasar (K3); pengangkutan (K4); dan pemerintahan (K7). Selanjutnya, Losch (1954) menguraikan lokasi industry optimal dimana industry tersebut dapat menguasai wilayah pasar terluas, sehingga dihasilkan pendapatan tertinggi.

Menurut Robert Chamber (1992), *social map* adalah proses pengumpulan dan penggambaran (*profiling*) data dan informasi, termasuk potensi, kebutuhan dan permasalahan (sosial, ekonomi, tekno, dan kelembagaan) masyarakat. Sedangkan menurut Suharto (2005) pemetaan social adalah sebuah pendekatan yang dipengaruhi oleh ilmu sosial dan geografi yang hasil akhirnya berupa suatu peta wilayah / spasial yang menggambarkan secara fokus karakteristik dan masalah sosial, seperti jumlah dan lokasi orang miskin, rumah kumuh, bencana dan lain-lain yang ditandai dengan warna tertentu sesuai dengan pemusatannya.

2. Pertumbuhan

Pada 1956, Walter Isard dinilai telah menyusun konsep-konsep ilmu wilayah secara lebih komprehensif dan hubungan teori lokasi dengan cabang ilmu lainnya. Selanjutnya, Francois Perroux (1964) menyatakan bahwa pusat pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat, tidak terjadi secara serentak, pertumbuhan terjadi pada kutub-kutub pertumbuhan serta berkembang, menyebar dan mempengaruhi keseluruhan perekonomian. Konsep ini dikenal sebagai “Teori Kutub Pertumbuhan

(*growth pole theory*). Boedeville (1966) menyatakan bahwa kutub pertumbuhan wilayah adalah sekelompok industri yang meluas di perkotaan dan mempengaruhi daerah belakangnya (*hinterland*). Dari teori kutub pertumbuhan (Perroux dan Boudeville), kemudian dikenal konsep-konsep penting pembangunan wilayah : *leading industry, polarisasi, aglomerasi, spread effects (trickling-down effects)*

3. Sektor Ekonomi Unggulan

Dalam publikasi PDRB Jawa Timur (BPS, 2017), sektor ekonomi unggulan adalah sektor ekonomi yang memiliki peranan relatif lebih besar dibanding sektor-sektor lainnya. Sektor ekonomi adalah lapangan usaha yang terdapat pada PDRB yang dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)* sebagai berikut:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

4. *Location Quotient*

Location Quotient atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya sektor/industri tersebut secara nasional (Tarigan, 2012). Menurut Warpani (1984), pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas.

Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang tidak sama, begitupun di tingkat pengembangan sektor ekonomi. Sehingga kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang

memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang

Industri perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Perbankan pun sangat menyokong untuk pengembangan sektor ekonomi, karena tidak dipungkiri perputaran uang sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor ekonomi.

Pembiayaan pada industri perbankan cukup berkontribusi dalam kemajuan perekonomian di Indonesia umumnya dan khususnya kabupaten Jember dan Bondowoso, banyak juga jenis pembiayaan dalam berbagai sektor salah satunya sektor ekonomi yang terdiri atas sembilan sektor.

BAB 2

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Ragam Kesenjangan

IMF (2014) menulis bahwa esenjangan ekonomi dapat dilihat dari berbagai perspektif. Masing-masing perspektif memberikan wawasan mengenai sifat dasar, penyebab, dan konsekuensinya terhadap kesenjangan ekonomi yang berbeda-beda.

Pertama adalah kesenjangan pendapatan (*inequality of income*). Kesenjangan ini berfokus pada distribusi pendapatan antarindividu. Kedua, kesenjangan atas kekayaan (*inequality of income*). Kesenjangan ini berfokus pada distribusi pendapatan antarindividu atau antar rumah tangga. Ketiga, kesenjangan seumur hidup (*lifetime inequality*). Kesenjangan tipe ini berfokus pada pengukuran kesenjangan pendapatan untuk tiap individu semasa hidupnya. Terakhir, kesenjangan kesempatan (*inequality of opportunity*) yang berfokus pada hubungan antara kesenjangan pendapatan dan mobilitas sosial, terutama pada kesenjangan antargenerasi.

Berdasarkan dimensinya, kesenjangan bisa dibagi menjadi lima jenis (Ferdinand, 2008), yaitu kesenjangan antarindividu, kesenjangan territorial (wilayah), kesenjangan antar gebder, kesenjangan financial, dan kesenjangan digital. Selain dari bentuk dimensinya, kesenjangan juga bisa dibagi berdasarkan asal-muasalnya yaitu ketidaksetaraan politik (*political inequality*), kesenjangan hasil (*inequality of outcome*), kesenjangan akan akses kehidupan (*inequality of Opportunity*), kesenjangan perlakuan (*inequality of treatment*) dan kesenjangan keberterimaan di masyarakat (*inequality of membership*).

Dalam konteks yang lebih luas, Milanovic (2012) membagi kesenjangan menjadi tiga: pertama, kesenjangan antar individu dalam suatu Negara. Kedua, kesenjangan antar Negara, Lalu ketiga, kesenjangan antar individu dalam tata global (*global inequality*).

2.2 Potensi Relatif Perekonomian Wilayah

Semua Kepala Daerah dituntut memiliki kapasitas untuk menganalisa keunggulan ekonomi daerahnya. Hal ini erat kaitannya dengan tugasnya di satu sisi menetapkan

sektor mana yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan disisi lain mampu memetakan sektor ekonomi yang dianggap masih lemah dan memprioritaskan kebijakannya untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut. Seorang pimpinan daerah penting dan wajib memahami sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan mengembangkannya untuk menyokong sektor lain guna memiliki kinerja yang sama.

Keunggulan komparatif, *location quotient*, dan analisis *shift share* adalah sebagian alat analisa atau model yang dikembangkan untuk melihat potensi ekonomi sebuah daerah (Arsyad, 1999)

Awal istilah *Comparative advantage* (keunggulan komparatif) disampaikan oleh Ricardo (1917) tentang perdagangan dua negara. Dalam teorinya Ricardo mengungkap bahwa ketikadua daerah / negara yang sedang berniaga dan masing-masing negara fokus untuk mengirimkan barang satu sama lain yang memiliki keunggulan bersaing maka dua negara akan memperoleh keuntungan. Unggul disini dipahami sebagai bentuk perbandingan dan bukan merupakan nilai tambah riil.

2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam analisa Ekonomi Regional. Alasannya jelas karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisa pertumbuhan ekonomi regional ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuh lambat. Disamping itu, analisa pertumbuhan ekonomi regional ini juga dapat menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah.¹

Pendekatan yang digunakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi terdiri dari :

1. Pendekatan Sektoral

Menganggap perlu melakukan analisis terhadap pembangunan nasional melalui kegiatan usaha demi kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sub-sub sektor atau sektor-sektor. Dasar berpijaknya pendekatan sektoral

¹ Sjafrizal, *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi*, (Sumatera Barat: Baduose Media, 2008), 85.

adalah mekanisme pengolahan satuan maupun kelompok kegiatan usaha sehingga dapat membawa dampak pengembangan yang langsung dirasakan oleh satuan-satuan kegiatan usaha. Tujuan pertumbuhan yang hendak dicapai dan hasilnya juga terungkap secara sektoral, yaitu baik yang menyangkut hasil produksi, pendapatan, lapangan kerja, maupun investasi dan kredit yang digunakan, kesemuanya diungkapkan menurut sektor-sektor.

2. Pendekatan Makro

Pada dasarnya memperhitungkan adanya tiga jenis kekuatan yang bekerja dalam kehidupan manusia, yaitu (1) kekuatan ekonomi, (2) kekuatan sosial, dan (3) kekuatan politik. Pendekatan makro digunakan untuk merencanakan dan mengukur hasil-hasil pembangunan nasional secara makro.²

Pertumbuhan ekonomi dapat diberikan batasan (pengertian) bermacam-macam. Ada yang memberikan batasan, bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional (wilayah), tidak memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk ataupun tidak memandang apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya empat faktor, yaitu:

1. Jumlah penduduk
2. Jumlah stok barang modal
3. Luas lahan dan kekayaan sumberdaya alam
4. Tingkat teknologi yang digunakan

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan pula perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari situ periode keperiode lainnya

² Rahardjo Adisasmito, *Pertumbuhan Wilayah & Wilayah Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 72.

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)* sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Sektor Konstruksi
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

4 Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi (*Economic Base Theory*) mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kegiatan basis (*Basic Activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ke tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau memasarkan barang-barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan bukan basis (*Non-Basic Activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang jadi; luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama adalah bersifat lokal.

Ada beberapa metode untuk memilih kegiatan basis dengan nonbasis, yaitu:

1. Metode Langsung

Metode langsung dapat dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut.

2. Metode tidak langsung

Metode dengan pengukuran tidak langsung terdiri dari :

- a. Metode dengan melalui pendekatan asumsi. Dalam metode asumsi berdasarkan kondisi di wilayah daerah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan non basis.
- b. Metode *Location Quotient* yaitu membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah kita dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional.

3. Metode Campuran

Metode campuran adalah gabungan antara metode asumsi dengan metode langsung. Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan, yaitu pengumpulan data sekunder, biasanya dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data seperti BPS. Dari data sekunder berdasarkan analisis ditentukan kegiatan mana yang dianggap basis dan yang non basis.

5 Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya. Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan.

Ciri-ciri sektor yang memiliki keunggulan adalah sebagai berikut:

- a. Sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- b. Sektor tersebut memiliki angka penyebaran yang relatif besar.
- c. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik keterkaitan depan ataupun kebelakang.
- d. Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

6 Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal (PEL) menngacu pada proses dimana pemerintah lokal atau organisasi berbasis masyarakat berusaha menggerakkan dan memerlihara aktivitas bisnis dan/atau kesempatan kerja. Tujuan utama PEL adalah merangsang kesempatan kerja lokal pada sektor tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. PEL berorientasi proses, yaitu pengembangan institusi yang baru, inustri alternative, memperbaiki kapasitas tenaga kerja, identifikasi pasar baru, transfer pengetahuan, dan memelihara perusahaan dan usaha yang baru (Blakely, 1994).

Tidak ada teori atau seperangkat teori yang cukup menjelaskan PEL, atau pengembangan ekonomi wilayah (PEW). Namun ada beberapa teori yang dapat

membantu untuk memahami alasan rasional PEL. Gabungan teori-teori dimaksud dinyatakan dalam persamaan berikut (Blakely 1994) :

$PEL/PEW = f$ (*sumber daya alam, tenaga kerja, modal investasi, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi industry, teknologi, skala, pasar ekspor, kondisi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah lokal, pengeluaran wilayah dan negara, faktor pendukung pembangunan*).

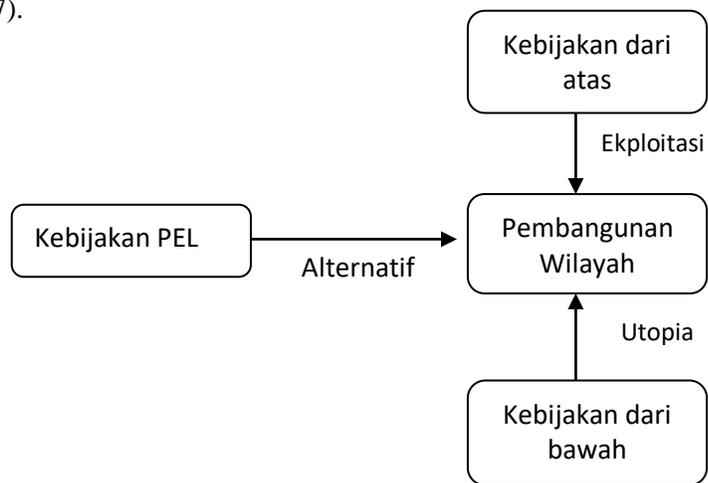
Semua faktor di atas mungkin penting dalam PEL, namun para praktisi pembangunan ekonomi tidak pernah yakin faktor mana yang memiliki bobot terbesar dalam suatu kondisi tertentu. PEL dapat dikaji berdasarkan beberapa teori, diantaranya : teori ekonomi neo klasik, teori basis ekonomi, teori lokasi, teori tempat pusat, teori kausasi kumulatif, dan model atraksi. Namun teori-teori pengembangan ekonomi ini tidak cukup menjadi “template” bagi aktivitas PEL, sehingga perlu dilakukan sintesis dan formulasi alternatif pendekatan PEL seperti pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Pendekatan Teori-teori Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan Kerja	Lebih banyak perusahaan = Lebih banyak pekerjaan	Perusahaan mengembangkan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan penduduk lokal
Basis Pembangunan	Membangun sektor-sektor ekonomi	Membangun institusi ekonomi yang baru
Aset Lokasi	Keunggulan komparatif berbasis asset fisik	Keunggulan bersaing berbasis kualitas lingkungan
Sumber Daya Pengetahuan	Ketersediaan tenaga kerja	Pengetahuan sebagai penggerak ekonomi

Sumber : Blakely (1994)

Kebijakan pembangunan wilayah berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat lokal. PEL menjadi alternatif akibat kelemahan top-down policy dan bottom-up policy. Kebijakan pembangunan dari atas dapat menyebabkan disparitas antar-wilayah akibat eksploitasi sumber daya lokal oleh wukayah yang lebih besar. Kebijakan dari bawah seringkali memiliki muatan yang baik tetapi lemah dalam implementasi sehingga tidak membumi dan bersifat utopia (Adji 2011, Anugerah dan Iqbal 2009, Supriyadi 2007).



Gambar 2.1

Kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan PEL

Sumber : Jef Rudiantho Saragih : Perencanaan wilayah dan pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Diawali dengan penggunaan metode kuantitatif yang menggunakan pendekatan *Location Quotient* atau disingkat LQ dari sektor ekonomi di daerah Kabupaten Jember dan Bondowoso. Selanjutnya mencari nilai korelasi atau seberapa kuat hubungan antara sektor ekonomi di kedua daerah tersebut dengan besarnya pembiayaan yang telah dikucurkan oleh bank-bank pemerintah pada sektor sektor unggulan daerah. Selanjutnya hasil dari kuantitatif dikonfirmasi dengan pendekatan kualitatif dengan informan adalah bank –bank pemerintah yang ada di kedua daerah yang menjadi obyek penelitian. Untuk menggali pertimbangan dalam pemberian kredit ke sektor-sektor tertentu

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah daerah yang sering disebut sebagai daerah Tapal Kuda (eks-wilayah Karesidenan Besuki) yaitu Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Adapun daerah yang menjadi subyek adalah Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Dengan variabel penelitian penyaluran kredit industri perbankan di sektor ekonomi dan pengembangan sektor ekonomi unggulan di kedua wilayah Kabupaten tersebut. Penelitian kali ini mengambil periode tahun 2011 – 2016 dengan data pertahun. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *time series* data. Data yang digunakan meliputi data penyaluran kredit di industri perbankan berdasarkan sektor ekonomi per Kabupaten di Jawa Timur dan data hasil analisis *location quotient* dari data penyaluran kredit perbankan per Kabupaten dan total penyaluran kredit di Jawa Timur. Data tersebut dapat diperoleh dari PDRB 4 Kabupaten yang menjadi obyek penelitian dan Buku Statistik Keuangan Wilayah Jawa Timur. Jurnal, artikel serta literatur-literatur lain juga digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini.

3.3 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian biasa disebut juga sebagai anggapan dasar atau postulat, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Asumsi penelitian pada penelitian ini adalah: terdapat hubungan antara pengembangan sektor ekonomi dengan pembiayaan perbankan.

3.4 Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah dan penelitian-penelitian sebelumnya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₀: Tidak terdapat hubungan antara pengembangan sektor ekonomi dengan pembiayaan perbankan.

H_a: Terdapat hubungan antara pengembangan sektor ekonomi dengan pembiayaan perbankan.

Alat Analisis yang digunakan yaitu *Location Quotient* atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor / industri tersebut di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor / industry tersebut secara nasional (Tarigan, 2012). Dengan rumus persamaannya :

$$LQ = \frac{\frac{x_i}{PDRB}}{\frac{X_i}{PNB}}$$

Dimana xi = Nilai tambah sektor i di suatu daerah

PDRB = Produk domestic regional bruto daerah tersebut

Xi = Nilai tambah sektor i secara nasional

PNB = Produk nasional Bruto atau GNP

Setelah didapatkan perhitungan dari LQ kemudian dicari keterkaitan atau kekuatan hubungan antara sektor ekonomi unggulan di suatu daerah atau sektor basis dengan sektor penyaluran kredit yang menjadi arah kebijakan perbankan di masing-masing daerah. Apakah sektor perbankan telah melakukan penyaluran kreditnya ke sektor yang menjadi unggulan atau basis di suatu daerah tertentu. Rumus korelasi sederhana :

$$r = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{[n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2][n(\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2]}}$$

Dimana r = besarnya koefisien korelasi silang antara besarnya penyaluran kredit

Dengan pengembangan sektor ekonomi

X = Nilai penyaluran kredit

Y = Nilai pengembangan sektor ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi sederhana diketahui hasil sebagai berikut :

No	Nilai Korelasi .(r)	Tingkat Hubungan
1	0,00 - 0,199	Sangat Lemah
2	0,20 - 0,399	Lemah
3	0,40 - 0,599	Cukup
4	0,60 - 0,799	Kuat
5	0,80 - 1	Sangat Kuat

Dari hasil korelasi sederhana, apabila koefisien korelasi menunjukkan tingkat hubungan yang kuat berarti pihak perbankan telah memberikan akses permodalan pada sektor basis atau unggulan dari wilayah obyek penelitian. Dengan kata lain perbankan dan pemerintah daerah telah berkolaborasi dalam mengurangi kesenjangan akses dan kesenjangan kesempatan.

BAB 4

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Obyek Penelitian

Pembahasan mengenai kondisi geografis daerah penelitian akan mempermudah dalam analisis permasalahan. Pemahaman tentang kondisi fisik dan ekonomi daerah penelitian digunakan sebagai dasar untuk mengetahui potensi wilayah. Oleh karena itu, gambaran tentang potensi wilayah diharapkan dapat memberi informasi bagaimana kedudukan wilayah tersebut terhadap wilayah yang lain. Dalam gambaran obyek penelitian diuraikan tentang letak, luas dan batas wilayah, serta karakteristik lingkungan fisik dan ekonomi Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

4.1.1 Letak, Luas dan Batas

Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, terletak \pm 200 km ke arah timur dari Surabaya. Secara geografis terletak pada posisi 113°15'47'' sampai 114°02'35'' Bujur Timur dan 7°58'06'' sampai 8°33'44'' lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Jember berupa daratan seluas 3.293,34 km². Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Jember memiliki batas : Barat Laut Kabupaten Probolinggo, Utara Kabupaten Bondowoso, Timur Kabupaten Banyuwangi, Selatan Samudra Indonesia dan Barat Kabupaten Lumajang.

Pada akhir tahun 2017, wilayah administrasi Kabupaten Jember terdiri dari 31 wilayah Kecamatan dan 248 desa/kelurahan. Dari 31 wilayah kecamatan, Tempurejo merupakan wilayah yang memiliki daratan terluas sebesar 524,46 km² yang sebagian besarnya masih berupa hutan. Selain itu Jember juga memiliki sekitar 67 pulau-pulau kecil, 16 pulau sudah memiliki nama dan 51 pulau lainnya belum memiliki nama.

Tabel 4.1

Dataran di Kabupaten Jember Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut)

Ketinggian dari Permukaan Laut	Coverage Area (%)
0 m - 25 m	17,95 %
26 m - 100 m	20,70 %
101 m -500 m	37,75 %
501 m -1 000 m	15,80%
1 001 m -2 500 m	6,85 %
>2 500 m keatas	0,95 %

Sumber : BPS Kab. Jember

Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso secara geografis berada di wilayah bagian Timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak sekitar 200 km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten Bondowoso terletak pada posisi 7°50'10" sampai 7°56'41" Lintang Selatan dan 113°48'10" sampai 113°48'26" Bujur Timur.

Wilayah Kabupaten Bondowoso sebelah barat dan utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember.

Wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 wilayah kecamatan, 209 desa dan 10 kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2017 luas wilayah administrasi masing-masing kecamatan, yaitu: Maesan (56,083 km²), Grujungan (74,443 km²), Tamanan (28,151 km²), Jambesari Darusholah (30,1054 km²), Pujer (39,889 km²), Tlogosari (110,917 km²), Sukosari (23,173 km²), Sumber wringin (137,947 km²), Tapen (57,042 km²), Wonosari (42,277 km²), Tenggarang (25,795 km²), Bondowoso (23,158 km²), Curahdami (50,286 km²), Binakal 39,039 km²), Pakem (92,082 km²), Wringin (58,010 km²), Tegal ampel (37,028 km²), Taman Krocok (53,00 km²), Klabang (91,204 km²), Botolinggo (127,414 km²), Ijen (207,20 km²), Prajekan (56,64 km²) serta Kecamatan Cerme (129,204 km²).

4.1.2 Visi dan Misi

Kabupaten Jember

Visi pembangunan Jember yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah: "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016- 2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Kabupaten Bondowoso

Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2014-2018 adalah : Terwujudnya masyarakat Bondowoso yang beriman, berdaya dan bermartabat secara berkelanjutan.

Beriman, Berdaya, Bermartabat dan Berkelanjutan adalah empat kata kunci visi pembangunan Kabupaten Bondowoso yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan masyarakat Bondowoso. Pemahaman atas visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan semua *stakeholders* dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bondowoso.

Misi untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Bondowoso Yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat Secara Berkelanjutan" sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bermartabat
- 2) Melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan
- 3) Melanjutkan akselerasi kebangkitan ekonomi yang didukung optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, kemitraan strategis, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan
- 4) Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif
- 5) Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum.
- 6) Melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup

4.1.3 Struktur Ekonomi

Kabupaten Jember

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Kabupaten Jember didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Jember.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Jember pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 27,39 persen (angka ini menurun dari 30,74 persen di tahun 2014). Selanjutnya lapangan usaha

Industri Pengolahan, sebesar 20,15 persen (naik dari 19,84 persen di tahun 2014), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13,96 persen pada tahun 2018 (angka ini meningkat dari 12,38 persen di tahun 2014). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,09 persen (naik dari 7,33 persen di tahun 2014) selanjutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 6,33 persen (naik dari 5,83 persen di tahun 2014).

Kabupaten Bondowoso

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Kabupaten Bondowoso didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bondowoso.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 30,36 persen (angka ini turun dari 33,70 persen di tahun 2014). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan, sebesar 22,53 persen (naik dari 20,84 persen di tahun 2014), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,34 persen (naik dari 14,28 persen di tahun 2014). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,63 persen (naik dari 9,14 persen di tahun 2014) dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 5,06 persen sedangkan tahun 2014 sebesar 5,04 persen.

4.2 Penyajian Data Kuantitatif

Pada penelitian ini data diperoleh dari Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur Desember 2018 publikasi statistik Bank Indonesia, namun karena publikasi PDRB per Kabupaten yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah hanya pada penerbitan posisi 2017 maka data statistik Bank Indonesia yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hanya sampai tahun 2017.

Data berikutnya adalah PDRB Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 dan PDRB Kabupaten Jember dan Bondowoso Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 yang diperoleh dari web resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember dan Bondowoso.

4.2.1 Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum Dan BPR Menurut Sektor Ekonomi Kabupaten Jember

Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang ini cukup tinggi sehingga banyak bank yang melakukan berbagai strategi untuk menarik minat masyarakat untuk dijadikan sebagai nasabahnya. Jumlah bank di kabupaten Jember sebanyak 89 bank Perkreditan dan 189 Bank Umum.

Tabel 4.,2

Jumlah Jaringan Kantor Bank Umum/BPR Akhir Tahun 2017

Tipe Bank	Kantor Pusat		Kantor Cabang		KC Pembantu		Kantor Kas		Total		ATM	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
BPR	24	24	9	9			56	56	89	89		
Bank Pemerintah			4	4	63	64	54	54	12	12	33	34
BPD			3	2	6	6	6	6	15	14	25	24
Bank Swasta Nasional Devisa			19	20	26	20	8	7	53	47	18	16
Bank Swasta Nasional Non Devisa			2	3					2	3		1
Bank Campuran			2	3					2	3	1	1

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember

Pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik yang hanya

mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia.³

Pinjaman yang diberikan Bank Umum Dan BPR menurut sektor ekonomi Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pinjaman yang Diberikan Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Per Dati II
Menurut Sektor Ekonomi Kabupaten Jember (Juta Rupiah)
tahun 2011-2017

DATI II SEKTOR EKONOMI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	364.894	573.525	573.428	736.622	681.365	544.221	618.203
Pertambangan dan Penggalian	1.293	2.074	1.535	1.755	2.498	2.753	4.309
Industri Pengolahan	325.241	378.214	446.705	478.955	580.842	553.754	890.976
Listrik, Gas dan Air Bersih	2.163	3.862	5.860	7.499	11.209	9.348	9.115
Konstruksi	147.867	142.135	166.786	252.622	403.474	407.916	386.188
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.652.131	2.137.924	2.609.843	2.880.968	2.996.547	3.139.603	3.558.788
Pengangkutan dan Komunikasi	24.845	26.770	32.007	43.103	56.359	67.159	73.713
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	153.112	201.977	204.426	223.651	236.643	240.322	228.240
Jasa-Jasa	778.983	559.293	364.509	397.985	297.716	434.662	561.174
TOTAL	3.450.529	4.025.774	4.405.099	5.023.160	5.266.653	5.399.739	6.330.705

Sumber: Statisti Keuangan Daerah Jawa Timur 2017 yang di publikasikan Bank Indonesia (Data diolah)

4.2.2 Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum Dan BPR Menurut Sektor Ekonomi Kabupaten Bondowoso

Untuk wilayah kerja Bondowoso Posisi dana bank yang tersedia sampai Desember 2017 sebesar 1.902.465 juta rupiah, meningkat 14,02 persen dibanding tahun 2016, yang terdiri dari giro sebesar 183.668 juta rupiah, deposito sebesar 391.786 juta rupiah dan tabungan sebesar 1.327.011 juta rupiah. Posisi pinjaman akhir desember 2017 pada bank umum dilihat dari penggunaannya masih didominasi oleh kepentingan konsumsi sebanyak 1.509.486 juta rupiah, sementara 975.336 juta digunakan untuk modal kerja, dan 190.475 juta digunakan untuk investasi.

³ Departemen Statistik Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan*, x.

Dilihat dari sektor ekonomi, pinjaman bank banyak terserap pada akhir desember 2017 terbanyak oleh sektor ekonomi Jasa-jasa, 1.349.032 juta, Perdagangan, Restoran dan Hotel sebesar 768.766 juta rupiah, sektor ketiga adalah pertanian dengan pinjaman sebesar 234.007 dan sektor ke empat adalah Perindustrian dengan nilai pinjaman sebesar 134.776 juta.

Tabel 4.3

Jumlah Bank di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017

Tipe dan Kelompok Bank	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	ATM
Bank Umum			
1. Bank Pemerintah	4	45	78
2. BPD	1	7	14
3. Bank Swasta Nasional	7	10	6
Bank Umum Devisa			
1. Bank Pemerintah	4	45	78
2. BPD	1	7	14
3. Bank Swasta Nasional	7	10	6
Bank Umum Non Devisa	-	-	-
BPR	5	17	-

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember

4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha sebagai berikut:

Tabel 4.4
Angka PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	11.164.080	11.654.480	12.112.170	12.529.080	13.055.720	13.559.730	13.851.700
Pertambangan dan Penggalian	1.971.070	2.091.200	2.065.260	2.124.140	2.187.720	2.296.420	2.427.180
Industri Pengolahan	7.198.470	7.782.660	8.149.760	8.856.910	9.280.940	9.713.590	10.258.780
Listrik, Gas dan Air Bersih	40.300	42.800	45.700	48.790	51.830	54.900	58.030
Konstruksi	2.239.950	2.323.400	2.571.960	2.812.410	2.959.750	3.164.710	3.404.780
Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.155.800	4.412.850	4.831.930	5.165.330	5.534.560	5.887.340	6.344.250
Pengangkutan dan Komunikasi	2.209.820	2.351.420	2.604.270	2.844.110	3.722.540	4.030.170	4.339.010
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	1.314.300	1.437.800	1.530.000	1.639.800	1.728.740	1.844.950	1.934.140
Jasa-Jasa	2.408.000	2.578.500	2.759.300	2.984.240	3.142.890	3.324.290	3.503.350
TOTAL	32.701.790	34.675.110	36.670.350	39.004.810	41.664.690	43.876.100	46.121.220

Sumber: BPS Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Data diolah)

4.2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha sebagai berikut:

Tabel 4.5
Angka PDRB Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Juta Rupiah)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	3.044.330	3.167.056	3.261.300	3.344.724	3.431.043	3.518.300	3.623.700
Pertambangan dan Penggalian	218.802	222.925	225.884	231.077	236.418	241.400	253.800
Industri Pengolahan	1.991.509	2.090.295	2.291.053	2.416.414	2.556.199	2.562.000	2.714.400
Listrik, Gas dan Air Bersih	12.035	12.937	13.500	14.000	14.600	15.300	16.000
Konstruksi	685.254	744.133	813.596	878.144	932.916	988.500	1.052.000
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.270.233	1.391.656	1.520.142	1.628.664	1.748.079	1.859.100	1.975.900
Pengangkutan dan Komunikasi	532.382	586.322	674.600	743.200	822.400	909.600	993.400
Keuangan Real Estate dan Jasa Perusahaan	368.655	402.916	505.600	566.600	637.400	704.200	760.500
Jasa-Jasa	515.345	555.963	673.800	759.900	845.900	910.300	984.200
TOTAL NILAI	8.638.545	9.174.203	9.979.475	10.582.723	11.224.956	11.708.700	12.373.900

Sumber: BPS Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Data diolah)

4.3 Analisis dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis *Location Quotient* Kabupaten Jember

Analisis *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui apakah sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Jember termasuk kegiatan basis atau bukan basis sehingga dapat melihat sektor-sektor yang termasuk ke dalam kategori sektor unggulan. Perhitungan *Location Quotient* pada penelitian ini menggunakan PDRB Kabupaten Jember tahun 2011-2017 dengan PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017.

Berikut adalah hasil perhitungan *Location Quotient* Kabupaten Jember:

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan *Location Quotient* Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Jember Tahun 2011-2017

SEKTOR EKONOMI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2,16	2,40	2,43	2,41	2,40	2,48	2,50	2,40
Pertambangan dan Penggalian	0,91	1,08	1,06	1,05	0,98	0,92	0,91	0,99
Industri Pengolahan	0,63	0,72	0,71	0,71	0,70	0,71	0,71	0,70
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,25	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,26
Konstruksi	0,63	0,68	0,70	0,72	0,73	0,75	0,76	0,71
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,59	0,64	0,67	0,68	0,67	0,69	0,70	0,66
Pengangkutan dan Komunikasi	1,15	0,79	0,79	0,81	0,98	1,01	1,02	0,93
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	1,99	0,80	0,77	0,77	0,75	0,58	0,59	0,89
Jasa-Jasa	3,99	1,48	1,48	1,50	1,47	1,50	1,52	1,85

Sumber: BPS Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Data diolah)

Tabel berikut menunjukkan urutan sektor basis atau sektor unggulan Kabupaten Jember mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Kolom per tahun bisa dilihat urutan dari posisi LQ tertinggi sampai terendah

Tabel 4. 7
Location Quotient Sektor Ekonomi Dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kabupaten
Jember Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016

No	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Jasa-Jasa	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan						
2	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	Jasa-Jasa						
3	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Pertambangan dan Penggalian	Pertambangan dan Penggalian	Pengangkutan dan Komunikasi	Pengangkutan dan Komunikasi	Pengangkutan dan Komunikasi	Pengangkutan dan Komunikasi	Pertambangan dan Penggalian
4	Pengangkutan dan Komunikasi	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Pengangkutan dan Komunikasi	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Pertambangan dan Penggalian	Pertambangan dan Penggalian	Pertambangan dan Penggalian	Pengangkutan dan Komunikasi
5	Pertambangan dan Penggalian	Pengangkutan dan Komunikasi	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Konstruksi	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Konstruksi	Konstruksi	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
6	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan	Konstruksi	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan	Konstruksi
7	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Industri Pengolahan	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Industri Pengolahan
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Perdagangan, Hotel dan Restoran				
9	Listrik, Gas dan Air Bersih							

Sumber: BPS Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Data diolah)

Berdasarkan hasil *Location Quotient* PDRB tahun 2011-2017 pada tabel 4.6 dan 4.7 sektor yang memiliki nilai koefisien LQ < 1 yang artinya sektor tersebut merupakan sektor nonbasis pada pengembangan sektor ekonomi Kabupaten Jember. Pada tabel terdapat 7 sektor yaitu: (1) sektor pertambangan dan penggalian; (2) sektor industri pengolahan; (3) sektor listrik, gas dan air bersih; (4) sektor konstruksi; (5) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (6) pengangkutan dan komunikasi; dan (7) sektor keuangan real estate dan jasa perusahaan.

Sedangkan sektor yang memiliki nilai koefisien LQ > 1 yang artinya sektor tersebut merupakan sektor basis yaitu (1) sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan

Perikanan dan (2) sektor jasa-jasa selama tahun 2011-2017 dengan nilai koefisien 2,40 dan 1,85. Kedua sektor tersebut dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan.

Selama kurun waktu 2011-2017 sektor yang memiliki nilai koefisien LQ paling kecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan kisaran nilai koefisien secara berturut-turut adalah 3,99; 1,48; 1,48; 1,50; 1,47; 1,50 dan 1,52. Hal ini disebabkan karena produksi listrik sebagian besar diproduksi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan untuk kabupaten Jember hanya ada proses distribusi saja, sedangkan produksi gas dihasilkan oleh Perusahaan Gas Negara dan untuk kabupaten Jember masih belum ada yang memproduksi.

Dalam penyaluran pembiayaan, perbankan juga mempertimbangkan 9 sektor ekonomi. Perbankan pun sangat menyokong untuk pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Jember dan Bondowoso, karena tidak dipungkiri perputaran uang sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor ekonomi. Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Hampir semua daerah di Indonesia baik kabupaten maupun provinsi, pembiayaan di Sembilan sektor tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan, menandakan banyaknya kontribusi industri perbankan baik konvensional maupun syariah terhadap pertumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi yang memberikan efek positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dalam konteks penelitian adalah di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan *Location Quotient* Sektor Ekonomi Pada Pembiayaan Industri Perbankan di Kabupaten Jember Tahun 2011-2017

SEKTOR EKONOMI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2,68	3,55	3,73	3,66	3,79	3,63	3,24	3,47
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03
Industri Pengolahan	0,25	0,24	0,24	0,22	0,26	0,25	0,35	0,26
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,03	0,04	0,08	0,13	0,20	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	0,97	0,77	0,81	1,08	1,61	1,37	1,03	1,09
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,50	1,61	1,73	1,70	1,64	1,66	1,64	1,64
Pengangkutan dan Komunikasi	0,18	0,14	0,16	0,22	0,29	0,31	0,24	0,22
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	1,08	1,31	1,29	1,08	1,01	0,89	0,78	1,06
Jasa-Jasa	2,18	1,95	1,75	1,85	1,65	2,28	2,16	1,97

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Jawa Timur 2011 - 2017 (Data diolah)

Tabel 4. 9
Location Quotient Sektor Ekonomi Dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Pada
Pembiayaan Industri Perbankan di Kabupaten Jember
Tahun 2011-2017

No	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan							
2	Jasa-Jasa							
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran							
4	Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi
5	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi	Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan				
6	Industri Pengolahan							
7	Pengangkutan dan Komunikasi							
8	Listrik, Gas dan Air Bersih							
9	Pertambangan dan Penggalian							

Sumber: Statisti Keuangan Daerah Jawa Timur 2017(Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil analisis *Location Quotient* sektor ekonomi dalam pengembangan sektor ekonomi unggulan pada industri perbankan di kabupaten Jember Tahun 2011-2017. Bila hasil LQ > 1 maka pembiayaan dalam sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis dalam analisis sektor ekonomi industri perbankan diantaranya adalah: (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) sektor jasa-jasa; (3) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (4) sektor konstruksi; dan (5) sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan. Sektor - sektor tersebut berpotensi untuk menjadi sektor unggulan dalam pengembangan sektor ekonomi unggulan yang menjadi *core business* penyaluran pembiayaan di Kabupaten Jember. Sedangkan hasil LQ < 1 maka pembiayaan dalam sektor ekonomi tersebut merupakan sektor non basis dalam analisis sektor ekonomi industri perbankan yang belum menjadi sektor incaran atau prospek perbankan. Sektor sektor tersebut diantaranya adalah: (1) sektor industri

pengolahan; (2) sektor pengangkutan dan komunikasi; (3) sektor listrik, gas dan air bersih, dan (4) sektor Pertambangan dan Penggalian.

4.3.2 Analisis Korelasi *Product Moment* Kabupaten Jember

Analisis korelasi *Product Moment* digunakan untuk mengetahui hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel yaitu pengembangan sektor ekonomi (X) dengan pembiayaan perbankan di Kabupaten Jember (Y). Jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel yang lain maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Berikut adalah hasil perhitungan korelasi *Product Moment*:

Tabel 4.10
Hasil Analisis Korelasi *Product Moment* Pengembangan Sektor Ekonomi Dengan Pembiayaan Perbankan Kabupaten Jember

Sektor Ekonomi	R	Tingkat Hubungan	Nilai Sig	Keputusan
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	0,524	Cukup	0,227	Ho Diterima
Pertambangan dan Penggalian	0,961	Sangat kuat	0,001	Ho Ditolak
Industri Pengolahan	0,903	Sangat kuat	0,005	Ho ditolak
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,882	Sangat kuat	0,009	Ho ditolak
Konstruksi	1	Sangat kuat	0,004	Ho ditolak
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,970	Sangat kuat	0,000	Ho ditolak
Pengangkutan dan Komunikasi	0,994	Sangat kuat	0,000	Ho ditolak
Keuangan Real Estate dan Jasa Perusahaan	0,870	Sangat kuat	0,011	Ho ditolak
Jasa-Jasa	-0,464	Cukup	0,294	Ho Diterima

Sumber: Data diolah

Tabel 4.10 merupakan hasil korelasi *Product Moment* pengembangan sektor ekonomi dengan pembiayaan perbankan Kabupaten Jember. Pada pembiayaan sektor ekonomi pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebagai salah satu sektor basis memiliki hubungan yang cukup dengan nilai R sebesar 0,524. Namun nilai

signifikansinya bernilai 0,227 atau $>$ dari nilai alpha 0,05 yang artinya H_0 diterima atau tidak ada hubungan antara pembiayaan perbankan dengan pengembangan sektor ekonomi pertanian. Kondisi ini terjadi karena pembiayaan pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan nilainya setiap tahun mengalami kenaikan namun kenaikannya tidak stabil selama tahun 2011 sampai 2017.

Sektor basis berikutnya adalah sektor jasa memiliki nilai R sebesar $-0,464$ yang mengindikasikan hubungan yang cukup atau tidak terlalu kuat antara pembiayaan perbankan dan kenaikan PDRB sektor jasa. Tanda $-$ (negatif) memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut bersifat berlawanan artinya peningkatan pembiayaan perbankan di sektor jasa tidak serta merta menaikkan atau mengembangkan sektor jasa. Dengan nilai signifikansi 0,294 atau lebih besar dari alpha 0,05 (H_0 diterima) berarti bisa juga dikatakan sektor jasa tidak memiliki hubungan atau korelasi dengan pembiayaan perbankan. Sedangkan sektor basis lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor konstruksi dan sektor Keuangan, real estate dan jasa perusahaan memiliki nilai R masing-masing berturut-turut adalah 0,970; 1; dan 0,870 yang mengindikasikan hubungan atau korelasi yang sangat kuat, Kondisi ini disebabkan pembiayaan pada sektor ini untuk setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan diikuti hasil pengembangan sektor ekonominya yang merupakan sektor basis dalam pembiayaan perbankan.

Pada pembiayaan sektor non basis atau tidak masuk dalam sektor ekonomi unggulan Kabupaten Jember yaitu (1) sektor industri pengolahan; (2) sektor pengangkutan dan komunikasi; (3) sektor listrik, gas dan air bersih, dan (4) sektor Pertambangan dan Penggalian. Nilai koefisien korelasi dari masing-masing sektor ini adalah 0,903; 0,994; 0,882; dan 0,961 dengan nilai signifikansi rata-rata di bawah nilai alpha 0,05 berarti H_0 ditolak atau ada hubungan antara pembiayaan perbankan dengan pengembangan sektor ekonomi. Nilai koefisien tersebut sebagai salah satu indikator keempat sektor di atas memiliki hubungan yang sangat kuat.

4.3.3 Analisis *Location Quotient* Kabupaten Bondowoso

Analisis *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui apakah sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Bondowoso termasuk kegiatan basis atau bukan basis sehingga dapat melihat sektor-sektor yang termasuk ke dalam kategori sektor unggulan. Perhitungan *Location Quotient* pada penelitian ini menggunakan PDRB Kabupaten Bondowoso tahun 2011-2017 dengan PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2017.

Berikut adalah hasil perhitungan *Location Quotient* Kabupaten Bondowoso:

Tabel 4.11
Hasil Perhitngan *Location Quotient* Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2,23	2,5	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4
Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Industri Pengolahan	0,66	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,28	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Konstruksi	0,73	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,68	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pengangkutan dan Komunikasi	1,04	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8
Keuangan Real Estate dan Jasa Perusahaan	2,12	0,8	0,9	1,0	1,0	0,8	0,9	1,1
Jasa-Jasa	3,24	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7

Sumber: BPS Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Data diolah)

Tabel berikut menunjukkan urutan sektor basis atau sektor unggulan Kabupaten Bondowoso mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Kolom per tahun bisa dilihat urutan dari posisi LQ tertinggi sampai terendah.

Tabel 4. 12
Location Quotient Sektor Ekonomi Dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2016

No	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Jasa-Jasa	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan						
2	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	Jasa-Jasa						
3	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Konstruksi	Konstruksi	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
4	Pengangkutan dan Komunikasi	Konstruksi	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Pengangkutan dan Komunikasi	Pengangkutan dan Komunikasi	Pengangkutan dan Komunikasi
5	Konstruksi	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Konstruksi
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Pengangkutan dan Komunikasi	Pengangkutan dan Komunikasi	Pengangkutan dan Komunikasi	Pengangkutan dan Komunikasi	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan, Hotel dan Restoran
7	Industri Pengolahan							
8	Pertambangan dan Penggalian							
9	Listrik, Gas dan Air Bersih							

Sumber: BPS Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (Data diolah)

Berdasarkan hasil *Location Quotient* PDRB tahun 2011-2017 pada tabel 4.11 dan 4.12 sektor yang memiliki nilai koefisien LQ < 1 yang artinya sektor tersebut merupakan sektor non-basis pada pengembangan sektor ekonomi Kabupaten Bondowoso. Pada tabel terdapat 6 sektor yaitu: (1) sektor pertambangan dan penggalian; (2) sektor industri pengolahan; (3) sektor listrik, gas dan air bersih; (4) sektor konstruksi; (5) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (6) dan pengangkutan dan komunikasi

Sedangkan sektor yang memiliki nilai koefisien LQ > 1 yang artinya sektor tersebut merupakan sektor basis yaitu (1) sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, (2) sektor jasa-jasa dan (3) sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan

selama tahun 2011-2017 dengan nilai koefisien 2,38; 1,68 dan 1,08. Ketiga sektor tersebut dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan.

Selama kurun waktu 2011-2017 sektor yang memiliki nilai koefisien LQ paling kecil adalah (1) sektor listrik, gas dan air bersih; (2) sektor pertambangan dan penggalian; (3) sektor industri pengolahan; (4) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (5) sektor konstruksi; dan (6) sektor pengangkutan dan komunikasi dengan kisaran nilai koefisien secara berturut-turut adalah 0,28; 0,40; 0,71; 0,77; 0,83; dan 0,84. Hal ini disebabkan karena produksi listrik sebagian besar diproduksi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan untuk kabupaten Bondowoso hanya ada proses distribusi saja, sedangkan produksi gas dihasilkan oleh Perusahaan Gas Negara dan untuk kabupaten Bondowoso masih belum ada yang memproduksi.

Dalam penyaluran pembiayaan, perbankan juga mempertimbangkan 9 sektor ekonomi. Perbankan pun sangat menyokong untuk pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Bondowoso, karena tidak dipungkiri perputaran uang sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor ekonomi. Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Hampir semua daerah di Indonesia baik kabupaten maupun provinsi, pembiayaan di Sembilan sektor tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan, menandakan banyaknya kontribusi industri perbankan baik konvensional maupun syariah terhadap pertumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi yang memberikan efek positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dalam konteks penelitian adalah di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Tabel 4.13
Hasil Perhitungan *Location Quotient* Sektor Ekonomi Pada Pembiayaan Industri
Perbankan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2017

Dati II dan Sektor Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2,86	4,03	4,27	4,43	4,50	3,58	4,02	3,95
Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,04	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01
Industri Pengolahan	0,27	0,21	0,16	0,12	0,19	0,27	0,28	0,21
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,10	0,03
Konstruksi	0,38	0,19	0,30	0,42	0,83	0,65	0,61	0,48
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,65	1,95	1,98	1,94	1,92	1,80	1,74	1,86
Pengangkutan dan Komunikasi	2,08	0,06	0,24	0,21	0,14	0,13	0,22	0,44
Keuangan Real Estate dan Jasa Perusahaan	0,69	0,79	0,88	1,13	0,55	0,55	0,45	0,72
Jasa-Jasa	1,26	1,01	1,03	1,01	0,80	2,63	2,51	1,47

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Jawa Timur 2011 - 2017 (Data diolah)

Tabel 4. 14
Location Quotient Sektor Ekonomi Dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Pada
Pembiayaan Industri Perbankan di Kabupaten Bondowoso
Tahun 2011-2017

No	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan							
2	Pengangkutan dan Komunikasi	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Jasa-Jasa	Jasa-Jasa	Perdagangan, Hotel dan Restoran			
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Jasa-Jasa	Jasa-Jasa	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Konstruksi	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Jasa-Jasa
4	Jasa-Jasa	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Jasa-Jasa	Jasa-Jasa	Konstruksi	Konstruksi	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
5	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Industri Pengolahan	Konstruksi	Konstruksi	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Konstruksi
6	Konstruksi	Konstruksi	Pengangkutan dan Komunikasi	Pengangkutan dan Komunikasi	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan	Pengangkutan dan Komunikasi
7	Industri Pengolahan	Pengangkutan dan Komunikasi	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan	Pengangkutan dan Komunikasi	Pengangkutan dan Komunikasi	Pengangkutan dan Komunikasi	Industri Pengolahan
8	Pertambangan dan Penggalian	Pertambangan dan Penggalian	Pertambangan dan Penggalian	Pertambangan dan Penggalian	Listrik, Gas dan Air Bersih			
9	Listrik, Gas dan Air Bersih	Pertambangan dan Penggalian	Pertambangan dan Penggalian	Pertambangan dan Penggalian	Pertambangan dan Penggalian			

Sumber: Statisti Keuangan Daerah Jawa Timur 2017(Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.14 hasil analisis *Location Quotient* sektor ekonomi dalam pengembangan sektor ekonomi unggulan pada industri perbankan di kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2017. Bila hasil LQ > 1 maka pembiayaan dalam sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis dalam analisis sektor ekonomi industri perbankan diantaranya adalah: (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) Perdagangan, hotel dan restoran dan (3) sektor jasa-jasa.

4.3.4 Analisis Korelasi *Product Moment* Kabupaten Bondowoso

Analisis korelasi *Product Moment* digunakan untuk mengetahui hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel yaitu pengembangan sektor ekonomi (X) dengan pembiayaan perbankan di Kabupaten Bondowoso (Y). Jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel yang lain maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Berikut adalah hasil perhitungan korelasi *Product Moment*:

Tabel 4.15
Hasil Analisis Korelasi *Product Moment* Pengembangan Sektor Ekonomi Dengan Pembiayaan Perbankan Kabupaten Bondowoso

Sektor Ekonomi	R	Tingkat Hubungan	Nilai Sig	Keputusan
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	- 0,132	Sangat lemah	0,778	Ho diterima
Pertambangan dan Penggalian	0,143	Sangat lemah	0,759	Ho diterima
Industri Pengolahan	-0,709	Kuat negatif	0,074	Ho diterima
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,712	Kuat	0,073	Ho diterima
Konstruksi	0,859	Kuat	0,013	Ho ditolak
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,620	Kuat	0,137	Ho diterima
Pengangkutan dan Komunikasi	- 0,522	Cukup negatif	0,229	Ho diterima
Keuangan Real Estate dan Jasa Perusahaan	0,005	Sangat lemah	0,991	Ho diterima
Jasa-Jasa	0,130	Sangat lemah	0,781	Ho diterima

Sumber: Data diolah

Tabel 4.15 merupakan hasil korelasi *Product Moment* pengembangan sektor ekonomi dengan pembiayaan perbankan Kabupaten Bondowoso. Pada pembiayaan sektor ekonomi pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebagai salah satu sektor basis memiliki hubungan yang lemah dengan nilai R sebesar 0.143 dan nilai signifikansi 0,778 yang lebih besar dari nilai alpha 0,05 yang keputusannya Ho diterima atau tidak ada

hubungan antara Pemberian pembiayaan pertanian terhadap pengembangan sektor ekonomi pertanian di Bondowoso.

Sektor basis berikutnya adalah sektor jasa dengan nilai LQ sebesar 1,47 dan sektor Perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai LQ sebesar 1,86. Untuk jasa sebagai salah satu sektor basis Kabupaten Bondowoso memiliki nilai koefisien korelasi yang lemah sebesar 0,130 dan nilai signifikansi 0,781 yang **lebih besar** dari nilai signifikansi alpha 0,05 dengan keputusan H_0 diterima artinya tidak ada hubungan antara pembiayaan perbankan terhadap pengembangan sektor jasa di Bondowoso. Untuk sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebagai salah satu sektor basis Kabupaten Bondowoso memiliki nilai koefisien korelasi yang cukup kuat sebesar 0,620 dan nilai signifikansi 0,137 yang **lebih besar** dari nilai signifikansi alpha 0,05 dengan keputusan H_0 diterima artinya tidak ada hubungan antara pembiayaan perbankan terhadap pengembangan sektor perdagangan di Bondowoso.

Pada pembiayaan sektor non basis atau tidak masuk dalam sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bondowoso ada satu sektor yang menjadi *highlight* dalam temuan penelitian ini yaitu sektor konstruksi. Nilai koefisien korelasi (R) dari sektor konstruksi sebesar 0.859 atau memiliki hubungan sangat kuat antara pemberian pembiayaan terhadap pengembangan sektor konstruksi. Untuk nilai signifikansi dari sektor ini 0.013 atau lebih kecil dari nilai alpha 0,05 dengan keputusan H_0 ditolak, yang artinya ada hubungan antara pemberian pinjaman terhadap pengembangan sektor konstruksi di Kabupaten Bondowoso .

4.4 Penyajian Data Kualitatif

Pengembangan ekonomi lokal membutuhkan kerjasama yang kuat antara semua *stakeholder*, pemerintah sebagai perencana harus didukung oleh berbagai pihak. Perbankan berpartisipasi untuk memberikan pendanaan pada pengembangan sektor-sektor unggulan. Perguruan tinggi menyiapkan SDM unggul yang diharapkan mampu mengelola seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap daerah.

Dalam riset ini menggunakan pendekatan *mix method* yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam langkah awal peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menentukan nilai LQ (*Location Question*) sektor basis dan

non basis di 2 kabupaten yaitu Jember dan Bondowoso berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 9 sektor ekonomi. Selanjutnya juga menentukan nilai LQ dari besaran nilai pembiayaan perbankan di 9 sektor ekonomi dalam sektor basis atau non-basis. Dari hasil LQ masing-masing baik dari pengembangan 9 sektor ekonomi di wilayah yang menjadi obyek penelitian maupun dari besarnya penyaluran pembiayaan dari 9 dicari keterkaitan dengan menggunakan teknik korelasi sederhana.

Dari hasil temuan penelitian dengan pendekatan kuantitatif selanjutnya didalami dengan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi atau keterangan kenapa sebuah sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan namun pihak perbankan sebagai lembaga pendukung mengabaikan sebuah sektor basis tapi lebih memprioritaskan sektor lain yang justru kadang bukan termasuk sektor basis atau unggulan sebuah daerah.

Kondisi ini dijelaskan oleh Bapak Indarto selaku Asisten Manager Pemasaran (AMP) BRI Bondowoso yang menyatakan :

“ Dalam melakukan pembiayaan, kami telah ditentukan dari kantor pusat untuk merambah sektor-sektor mana saja yang boleh kami biayai atau sektor mana saja yang harus kami hindari. Hal ini telah dikuatkan dengan Surat Edaran kantor pusat tentang Negatif List usaha yang harus kami hindari ”

Pernyataan ini dikuatkan oleh pernyataan Ibu Vita selaku salah satu officer Bidang Bisnis Program BRI Jember bahwa :

“Walaupun kami telah ditentukan sektor-sektor mana yang menjadi target dan sasaran bisnis bank kami melalui berbagai Surat Edaran, namun sesekali kami juga diminta untuk menyusun sebuah perencanaan pemasaran untuk menentukan sektor-sektor mana di area lokal kami yang menjadi sektor unggulan daerah. Meskipun akhirnya kami harus tetap tunduk mengikuti ketetapan Surat Edaran sebelumnya ”

Pimpinan Bank Syariah Mandiri Jember dan Pimpinan Bank Mega Syariah Jember memberikan keterangan yang hampir sama bahwa :

“Sebenarnya kami memahami bahwa setiap daerah memiliki potensi ekonomi dan sektor – sektor unggulan sendiri, namun kami tetap harus

berpegang teguh pada ketentuan perusahaan kami kemana arah core-business kami”

Dari temuan dalam pendekatan kuantitatif sebelumnya diungkap bahwa di Kabupaten Jember sektor yang memiliki nilai koefisien $LQ > 1$ yang artinya sektor tersebut merupakan sektor basis yaitu (1) sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan dan (2) sektor jasa-jasa selama tahun 2011-2017 dengan nilai koefisien 2,40 dan 1,85. Kedua sektor tersebut dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan. Sedangkan di Kabupaten Bondowoso sektor yang memiliki nilai koefisien $LQ > 1$ yang artinya sektor tersebut merupakan sektor basis yaitu (1) sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, (2) sektor jasa-jasa dan (3) sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan selama tahun 2011-2017 dengan nilai koefisien 2,38; 1,68 dan 1,08. Ketiga sektor tersebut dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan.

Namun dalam perhitungan korelasi antara penyaluran pembiayaan perbankan dan pengembangan sektor basis atau unggulan di sektor (1) sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, dan (2) sektor jasa-jasa menunjukkan bahwa nilai R (koefisien korelasi) dan nilai signifikansi terungkap tidak ada korelasi antara pembiayaan perbankan dan pengembangan sektor basis tersebut.

Menanggapi hasil ini Bapak Indarto (Asisten Manager Pemasaran) menyampaikan bahwa :

“Di bank kami sektor pertanian masih menjadi sektor andalan kami baik melalui pembiayaan Kupedes pertanian maupun melalui pembiayaan bisnis program. Namun dengan pertimbangan risiko pola bisnis pertanian murni yang musiman dan beberapa jenis komoditas yang memiliki titik kritis harga yang tidak stabil (cabe, tembakau, dan beberapa komoditas lain) dan titik kritis musim yang tidak bisa diprediksi, kami membatasi pembiayaan pada budidaya pertanian. Kami lebih fokus pada pembiayaan perdagangan komoditas hasil pertanian.”

Walaupun sektor jasa saat ini begitu menggeliat, bahkan menjadi sektor basis dari Jember dan Bondowoso, namun pihak perbankan masih belum banyak mengoptimalkan pembiayaan sektor jasa. Hal ini karena dalam penyaluran pembiayaan sektor jasa

memerlukan tambahan kemampuan tentang kredit investasi. Seperti yang disampaikan oleh Sdri. Vita (Officer Bisnis Program BRI Jember :

“Penyaluran pembiayaan ke sektor jasa memerlukan effort yang lebih dibandingkan dengan penyaluran ke sektor perdagangan misalnya. Sektor jasa biasanya memerlukan pembiayaan untuk pengadaan barang investasi (gedung, mesin dan kendaraan) atau biaya penyelesaian proyek. Pejabat kredit lini harus memahami model bisnis jasa dan pencairan tidak bisa sekaligus tapi secara periodic sesuai dengan perkembangan atau progress dari proyek, Dalam satu kali proyek bisa 3 (tiga) kali pencairan. Nah kondisi ini yang kadang – kadang membuat beberapa petugas bank menghindari kredit investasi yang juga memerlukan perhitungan matematis yang akurat untuk pembiayaan investasi.”

Mengenai arah pembiayaan ini pimpinan Bank Syariah Mandiri Jember menyampaikan :

“Sesuai dengan ketentuan di perusahaan kami dan arahan dari jajaran direksi, kami tidak bisa membiayai semua sektor sekaligus namun ada beberapa sektor yang menjadi prioritas kami seperti perdagangan, pengadaan perumahan dan layanan haji.”

Sedangkan Pimpinan Bank Mega Syariah menjelaskan tentang prioritas layanannya pada mitra korporasi.

“Kami tetap fokus memberikan pembiayaan sektor mikro dan penghimpunan dana nasabah, namun yang menjadi prioritas kami adalah pembiayaan pada usaha-usaha yang menjadi pendukung dari usaha group kami atau tricle down effect usaha group kami, seperti supplier transmart maupun pelanggan tetap dari pembelian grosir di transmart”

4.5 Pembahasan

4.5.1 Kabupaten Jember

Dalam temuan sebelumnya tentang sektor basis dan non basis didapatkan data sebagai berikut

Tabel 4.16
Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Jember

No	Sektor Ekonomi	Rata-Rata LQ PDRB
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,40
2.	Jasa-Jasa	1,85

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* pada tabel 4.16 menurut PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan dari sembilan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Jember terdapat dua sektor yang dikategorikan sebagai sektor unggulan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor jasa-jasa untuk tahun 2011-2017. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata LQ yang dimiliki sektor tersebut lebih besar dari satu yaitu 2,40 dan 1,85 pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor jasa-jasa menurut PDRB.

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan adalah penyumbang terbesar dari seluruh sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Jember. Meningkatnya besaran nilai LQ pada sektor tersebut tidak terlepas karena perekonomian Kabupaten Jember mempunyai sumber daya alam yang luas dan subur dan juga masih menjadi lapangan usaha sebagai tumpuan utama penduduk dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember. Dalam hal ini peranan pemerintah Jember cukup penting untuk mengembangkan sektor tersebut di masa yang akan datang.

Tabel 4.17
Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Pembiayaan Perbankan
Kabupaten Jember

No	Sektor Ekonomi	Rata-rata LQ
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3,47
2.	Jasa-jasa	1,97
3.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,64
4.	Konstruksi	1,09
5.	Keuangan, Real estate dan Jasa Perusahaan	1,06

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.17 hasil perhitungan *Location Quotient* sektor ekonomi pada industri perbankan di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2017 terdapat lima sektor ekonomi yang merupakan sektor basis dan dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan dalam pembiayaan perbankan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor konstruksi dan sektor keuangan dengan ditunjukkan rata-rata LQ lebih dari satu yaitu 3,47; 1,64; 1,97; 1,09 dan 1,06.

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan pada tabel 4.10 dalam pengembangan sektor ekonomi dan pembiayaan memiliki hubungan yang justru terbalik dan cukup menarik untuk didalami. Ditunjukkan dengan hasil korelasi *Product Moment* yaitu R 0,524 dengan signifikansi $0,227 \geq 0,05$ yang artinya pembiayaan perbankan di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan memiliki hubungan yang cukup. Dari nilai signifikansi menunjukkan H_0 diterima artinya tidak ada hubungan antara pembiayaan perbankan dan pengembangan sektor ekonomi di sektor pertanian dan turunannya ini. Walaupun sektor ini masuk sektor basis namun pembiayaan sektor perbankan mulai tahun 2011 hingga tahun 2017 naik turun. Kondisi ini seperti terjadi dari temuan penelitian hasil wawancara dari pihak perbankan bahwa sektor pertanian memiliki risiko yang cukup besar karena memiliki titik kritis yang perlu perhatian khusus seperti hasil yang tergantung musim, cuaca yang tidak terprediksi serta harga yang tidak

bisa diramalkan. Pihak perbankan juga telah memiliki core-business masing-masing yang kadang – kadang tidak menjadikan setor pertanian sebagai sektor prioritas

Sektor basis berikutnya adalah sektor jasa-jasa dalam pengembangan sektor ekonomi dan pembiayaan memiliki hubungan yang lemah pada tabel 4.10. Ditunjukkan dengan hasil korelasi *Product Moment* yaitu $R = 0,464$ dengan signifikansi $0,294 \geq 0,05$. yang artinya pembiayaan perbankan di sektor jasa-jasa memiliki hubungan yang lemah. Dari nilai signifikansi menunjukkan H_0 diterima artinya tidak ada hubungan antara pembiayaan perbankan dan pengembangan sektor ekonomi di sektor jasa ini. Setiap tahun mulai tahun 2011 sampai 2017 pembiayaan di sektor jasa Kabupaten Jember terus mengalami kenaikan walaupun nilainya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor jasa ini merupakan sektor yang cukup prospektif bagi pembiayaan perbankan mengingat saat ini bisnis jasa terus mengalami kenaikan. Beberapa bisnis jasa tidak hanya bidang kuliner tapi juga bidang transportasi, pendidikan, keuangan, keamanan, pariwisata dan banyak jasa lainnya. Utami Baroroh (2012) dalam hasil penelitiannya mengungkap bahwa kredit perbankan sangat mempengaruhi perekonomian regional. Hal ini menandakan kuatnya pengaruh bank terhadap aktivitas perekonomian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darryl Mario Agung (2017), menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dari penyaluran kredit produktif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Andhika Nanang Permana (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan BPRS kepada masing-masing sektor ekonomi terus mengalami tren yang meningkat dan berpengaruh terhadap BOPO BPRS.

Dalam upaya meningkatkan pengembangan sektor ekonomi dalam industri perbankan agar lebih mengutamakan pengembangan sektor unggulan dengan tidak mengabaikan sektor lain dalam pengembangan pembiayaan pada industri perbankan.

4.5.2 Kabupaten Bondowoso

Dalam temuan sebelumnya tentang sektor basis dan non basis didapatkan data sebagai berikut

Tabel 4.17
Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Bondowoso

No	Sektor Ekonomi	Rata-Rata LQ PDRB
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,40
2.	Jasa-Jasa	1,7
3.	Keuangan Real Estate dan Jasa Perusahaan	1.1

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* pada tabel 4.17 menurut PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan dari sembilan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Bondowoso terdapat tiga sektor yang dikategorikan sebagai sektor unggulan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor jasa-jasa dan keuangan, real estate dan jasa perusahaan untuk tahun 2011-2017. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata LQ yang dimiliki sektor tersebut lebih besar dari satu yaitu 2,40; 1,7 dan 1,1 pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan menurut PDRB.

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan adalah penyumbang terbesar dari seluruh sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Bondowoso. Meningkatnya besaran nilai LQ pada sektor tersebut tidak terlepas karena perekonomian Kabupaten Bondowoso mempunyai sumber daya alam yang luas dan subur dan juga masih menjadi lapangan usaha sebagai tumpuan utama penduduk dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bondowoso. Ke depan peran kemitraan Pemerintah Bondowoso dengan pihak perbankan sangat penting sebagai salah satu lembaga pendukung dalam hal pendanaan pembangunan di Bondowoso

Tabel 4.18
Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Pembiayaan Perbankan Kabupaten Bondowoso

No	Sektor Ekonomi	Rata-rata LQ
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Pertanian	3,95
3.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,86
4.	Jasa-jasa	1,47

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.18 hasil perhitungan *Location Quotient* sektor ekonomi pada industri perbankan di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2017 terdapat lima sektor ekonomi yang merupakan sektor basis dan dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan dalam pembiayaan perbankan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa, dengan ditunjukkan rata-rata LQ lebih dari satu yaitu 3,95; 1,86; dan 1,47.

Angka perhitungan korelasi yang disajikan pada tabel 4.15 dalam pengembangan sektor ekonomi dan pembiayaan baik sektor basis maupun non-basis memiliki hubungan yang justru terbalik dan cukup menarik untuk didalami. Hanya ada satu sektor yang memiliki hubungan positif antara pembiayaan perbankan dan pengembangan sektor ekonomi, itupun bukan sektor basis atau unggulan yaitu sektor konstruksi. Ditunjukkan dengan hasil korelasi *Product Moment* yaitu R 0,859 dengan signifikansi $0,013 \leq 0,05$ yang artinya pembiayaan perbankan di sektor konstruksi memiliki hubungan yang sangat kuat. Dari nilai signifikansi menunjukkan H_0 ditolak, artinya ada hubungan antara pembiayaan perbankan dan pengembangan sektor ekonomi di sektor konstruksi. Walaupun sektor ini tidak termasuk sektor basis namun pembiayaan sektor perbankan mulai tahun 2011 hingga tahun 2017 terus naik stabil. Kondisi ini seperti terjadi dari temuan penelitian hasil wawancara dari pihak perbankan bahwa sektor konstruksi oleh beberapa pihak perbankan masih dianggap sektor yang cukup aman untuk memperoleh laba. Disamping selama 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, sektor infrastruktur menjadi prioritas, pembangunan perumahan rakyat juga terus menggeliat walaupun di kota kecil seperti Bondowoso. Bahkan beberapa bank syariah *core business* utamanya mengarah ke pengembangan sektor perumahan, karena implementasi akadnya cukup mudah dan bisa mendapatkan income tetap dari transaksi akad *murabahah* pembelian perumahan.

Sektor berikutnya memiliki hubungan yang kuat adalah sektor Perdagangan. Ditunjukkan dengan hasil korelasi *Product Moment* yaitu R 0,620 namun memiliki nilai signifikansi $0,137 \geq 0,05$. yang artinya nilai signifikansinya menunjukkan H_0 diterima artinya tidak ada hubungan antara pembiayaan perbankan dan pengembangan sektor ekonomi di sektor perdagangan ini. Kondisi ini menurut pihak perbankan seperti dalam hasil wawancara karena pertimbangan risiko apabila memberikan pembiayaan pertanian.

Pola musiman sesuai siklus tanaman memiliki risiko cuaca, harga dan waktu untuk memperoleh laba tertunda menunggu siklus panen petani. Sehingga beberapa bank tetap membiayai bidang pertanian tapi dalam bidang perdagangan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari analisis *Location Quotient* menunjukkan bahwa di Kabupaten Jember sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor jasa-jasa merupakan sektor basis dan dikategorikan sebagai sektor unggulan Kabupaten Jember berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan Sektor unggulan Kabupaten Bondowoso adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa-jasa
2. Hasil dari analisis *Location Quotient* sektor ekonomi dalam pembiayaan perbankan menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor konstruksi, sektor keuangan, real estate & jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa merupakan sektor basis dan dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan dalam pembiayaan perbankan Kabupaten Jember. Sedangkan Kabupaten Bondowoso, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa bisa dijadikan sektor basis dalam pembiayaan.
3. Beberapa sektor ekonomi basis yang ada di Kabupaten Jember hasil analisis R antara pengembangan sektor ekonomi dengan pembiayaan perbankan bidang memiliki hubungan yang lemah dan cukup. Seperti sektor pertanian dan jasa-jasa tidak memiliki hubungan antara pembiayaan perbankan dan kedua sektor tersebut. Di Kabupaten Bondowoso juga hampir semua sektor basis maupun non basis tidak memiliki hubungan antara pembiayaan perbankan dan pengembangan sektor ekonomi. Hanya sektor konstruksi yang memiliki hubungan yang sangat kuat. Sedangkan sektor perdagangan memiliki koefisien korelasi yang kuat.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Jember dan Bondowoso diharapkan untuk mampu menopang perekonomian masyarakatnya dengan memprioritaskan sektor ekonomi unggulan, karena sektor tersebut merupakan sektor basis yang dapat meningkatkan perekonomian dan dapat mendukung perkembangan sektor perekonomian non basis.
2. Pihak perbankan walaupun memiliki core business prioritas sebagai sektor untuk mengakselerasi labanya, diharapkan tetap tidak meninggalkan sektor unggulan setiap daerah.
3. Bagi pihak perguruan tinggi bisa mempertimbangkan mengarahkan bidang kajiannya atau bahkan membuka program studi baru untuk pengembangan potensi atau sektor unggulan di daerahnya.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE.
- Agung, Darryl Mario. 2017. *Pengaruh Penyaluran Kredit Terhadap Perekonomian Indonesia*. Bandung: Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan
- Bambang Wibisono dan Ahmad Haryono, 2016. *Wacana Perkawinan di Tapal Kuda*, Penerbit Tapal kuda, Jember
- Baroroh, Utami. 2012. *Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine*. Malaysia: Jurnal, Universitas Islam Internasional Malaysia
- Boudenville, J. R. 1966. *Problem of Regional Economics Planning*. Edinburg University Press, Edinburg
- Carvalho, Laura, dan Armon Rezai. 2014. *Personal Income Inequality and Agregat Demand*. Sao Paulo : University of Sao Paulo
- Chatterjee, Satyajit 1994. *Transitional Dynamics and The Distribution of Wealth in Neoclassical Growth Model*. Journal of Public Economics, hal 97 - 119
- Christaller, Walter. 1933. *Central Places in Southern Germany*. Germany
- Perroux F. (1960), *Économie et Société, Contrainte, Échange, Don*. Presses Universitaires de France. Paris.
- Perroux F. (1961), *L'Économie du XXe siècle*. Presses Universitaires de France. Paris. Reprinted in 1991 by Presses universitaires de Grenoble: *Œuvres complètes*, Vol. 1.
- Perroux F. (1969), *Indépendance de l'économie nationale et interdépendance des nations*. Union générale d'éditions. Collection Monde en développement. Paris.
- Perroux F. (1970), "Les Conceptualisations implicitement normatives et les limites de la modélisation en économie". *Économies et Sociétés, Cahiers de l'ISEA*, Series EM, 4(26), 2255-2307.
- Galbraith, James K. 2016. *Inequality : What Everyone Needs to Know*. New York : Oxford University Press.
- Galor.Oded, dan Omar Moav. 2004. "From Physical to Human Capital Accumulation : Inequality and The Process of Development". *Review of Economic Studies*, hal 1001-1026

- International Monetary Fund, 2014. Fiscal Policy and Income Inequality. Washington DC : IMF.*
- Isard, W. 1956. *Location and Space-economy.* MIT Press, Cambridge.
- Losch, August. 1954. *Economics of Location.* London
- Milanovic 2012. *The Haves and the have-nots : A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality.* New York : Basic Books)
- Mount, Ferdinand, 2008. *Five Type of Inequality.* York : The Joseph Rowntree Foundation
- Permana, Andhika Nanang. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Terhadap Efisiensi Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.* Bogor: Skripsi, Universitas Pertanian Bogor.
- Ricardo, David 1951. *On The Principle og Political Economy and Taxation.* Yang diterbitkan sebagai buku I Work and Correspondence of David Ricardo, editor Pierro Sraffa dan Marice Dobb.
- Robert Chamber, 1992. *Rural Appraisal : Rapid, Relaxed and Participatory.* IDS Discussion Paper 311
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 9.
- Sastra Eka. 2017. *Kesenjangan Ekonomi : Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia.* Jakarta : Expose PT Mizan Publika
- Siregar Syofyan, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta Prenada Media.
- Sugiyono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Alfa beta
- Suharto, Edi. *membangun masyarakat memberdayakan rakyat, bandung:*Refika Aditama, 2005
- Tarigan Robinson, 2012. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi Edisi Revisi.* Jakarta : Bumi Aksara
- UNCDF, 2013. *Inclusive Future : Inequality, Inclusive Growth, and The Post-2015 Framework.* New York : UN Capital Development Fund
- Yuswadi, Harry. 2005. *Melawan Demi Kesejahteraan, Perlawanan Petani Jeruk terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian.* Jember: Kompyawisda.
- Hadts Riwayat Buchori Muslim
- Produk Domestik Bruto Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015

Produk Domestik Bruto Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 - 2015

Produk Domestik Bruto Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2015

Produk Domestik Bruto Kabupaten Situbondo Tahun 2011 - 2015

Statistik Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015 Bank Indonesia

Lampiran 1 : Output Hasil Perhitungan Korelasi Pembiayaan Perbankan dan Pengembangan Sektor Ekonomi Kabupaten Jember

Sektor Pertanian

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.524
	Sig. (2-tailed)		.227
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.524	1
	Sig. (2-tailed)	.227	
	N	7	7

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.961**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.961**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	7	7

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sektor Industri Pengolahan

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.903**
	Sig. (2-tailed)		.005
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.903**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	
	N	7	7

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sektor Listrik Gas dan Air Bersih

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.882**
	Sig. (2-tailed)		.009
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.882**	1
	Sig. (2-tailed)	.009	
	N	7	7

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sektor Konstruksi

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.918**
	Sig. (2-tailed)		.004
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.918**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	
	N	7	7

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.970**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.970**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	7	7

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.994**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.994**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	7	7

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.870*
	Sig. (2-tailed)		.011
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.870*	1
	Sig. (2-tailed)	.011	
	N	7	7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sektor Jasa-Jasa

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	-.464
	Sig. (2-tailed)		.294
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	-.464	1
	Sig. (2-tailed)	.294	
	N	7	7

Lampiran 2 : Output Hasil Perhitungan Korelasi Pembiayaan Perbankan dan Pengembangan Sektor Ekonomi Kabupaten Bondowoso

Sektor Pertanian

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	-.132
	Sig. (2-tailed)		.778
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	-.132	1
	Sig. (2-tailed)	.778	
	N	7	7

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.143
	Sig. (2-tailed)		.759
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.143	1
	Sig. (2-tailed)	.759	
	N	7	7

Sektor Industri Pengolahan

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	-.709
	Sig. (2-tailed)		.074
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	-.709	1
	Sig. (2-tailed)	.074	
	N	7	7

Sektor Listrik Gas dan Air Bersih

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.712
	Sig. (2-tailed)		.073
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.712	1
	Sig. (2-tailed)	.073	
	N	7	7

Sektor Konstruksi

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.859*
	Sig. (2-tailed)		.013
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.859*	1
	Sig. (2-tailed)	.013	
	N	7	7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.620
	Sig. (2-tailed)		.137
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.620	1
	Sig. (2-tailed)	.137	
	N	7	7

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	-.522
	Sig. (2-tailed)		.229
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	-.522	1
	Sig. (2-tailed)	.229	
	N	7	7

Sektor Keuangan, Real estate dan jasa perusahaan

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.005
	Sig. (2-tailed)		.991
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.005	1
	Sig. (2-tailed)	.991	
	N	7	7

Sektor Jasa Perusahaan

Correlations

		Bank	PDRB
Bank	Pearson Correlation	1	.130
	Sig. (2-tailed)		.781
	N	7	7
PDRB	Pearson Correlation	.130	1
	Sig. (2-tailed)	.781	
	N	7	7

Lampiran 3 Personalia

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Unit Kerja / Lembaga
1	Nurul Setianingrum , S.E, M.M	Manajemen	FEBI IAIN Jember
2	Nur Hidayat , S.E, M.M	Manajemen	FEBI IAIN Jember

Lampiran 4 Usulan Anggaran

No	Jenis Kegiatan	Vol	Frek	Satuan	Harga	Jumlah
A	Pra Kegiatan					
	Penyempurnaan Proposal					
1	FGD Pra Penelitian	2	1	JPL	900,000	1,800,000
2	konsumsi dan Snack	4	2	OA	30,000	240,000
3	Transportasi	4	2	Keg	100,000	800,000
	Sub Total					2,840,000
B	Pelaksanaan					
	Interview : Persiapan Pengumpulan Data ke Lapangan (kuesioner)					
1	FGD	2	1	JPL	900,000	1,800,000
2	konsumsi dan Snack	12	1	OA	30,000	360,000
3	Transportasi Lokal Peserta	10	1	OH	100,000	1,000,000
	Sub Total					3,160,000
C	Pengumpulan Data					
1	BBM (Pertalite)	20	10	Liter	7,500	1.500,000
2	Uang Harian	2	10	OH	250,000	5,000,000
3	Partisipasi Informan / acara	20	1	Keg	150,000	3,000,000
4						
5						
	Sub Total					9,500,000
D	Pengolahan Data & Penyusunan Laporan					
1	konsumsi dan Snack	4	4	JPL	30,000	480,000
2	Transportasi Lokal	4	4	OH	100,000	1.600,000
	Sub Total					2,080,000
E	Pasca Pelaksanaan					
	Evaluasi Penelitian					
	Writing Clinic					
1	konsumsi dan Snack	6	1	JPL	30,000	180,000
2	Transportasi Lokal	4	1	OH	150,000	600,000
3	Honor Narasumber	2	1	JPL	900,000	1,800,000
4	Upload Jurnal		1	Index	7.000.000	5.000.000
	Sub Total					7,580,000
F	Bahan-Bahan					
1	Kertas HVS	5	1	Rim	45,000	225,000
2	Tinta Printer	2	1	Pcs	200,000	400,000
3	Print dan Penjilidan	2	1	Paket	300,000	600,000
4	Flash disk	2	1	Pcs	150,000	300,000
	Sub Total					1,525,000

TOTAL	26.685,000
-------	------------

Lampiran 5 Jadwal Penelitian

Jadwal Kegiatan	Sept-Okt	Nopember	Januari- Februari	April- Mei	Juli
Persiapan Proposal	√				
Seminar Proposal		√			
Pengumpulan Data			√		
Penulisan Laporan Penelitian				√	
Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian					√
Seminar Hasil Penelitian					√

HALAMAN IDENTITAS & PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Pemetaan Perbankan Dan Pemerintah Daerah Dalam Memacu Pertumbuhan Sektor Riil Yang Terpinggirkan Di Wilayah Regional Eks Karesidenan Besuki
- b. Jenis Penelitian : Kualitatif/ Lapangan
- c. Kategori Penelitian : Kolektif
2. Peneliti
Ketua Tim
Nama Lengkap : Nurul Setianingrum, SE.,MM.
NIP/NIDN : 196905231998032001 / 2023056901
Pangkat : III/d
Jabatan : Lektor
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah / Ekonomi Islam
Vak Wajib : Sejarah Pemikiran Ekonomi
Anggota
Nama Lengkap : Nur Hidayat, SE.,MM.
NUP/NIDN : 201603132
Pangkat : III/b
Jabatan : Asisten Ahli
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Vak Wajib : Manajemen Keuangan
3. Lokasi Penelitian : Perbankan Kab. Jember dan Kab. Bondowoso
Biaya : Rp. 12.500.000
4. Sumber Dana : BOPTN Kementerian Agama 2019

Jember, 26 Nopember 2019

Menyetujui,

Ketua LP2M



H. Moch. Imam Mahfudi, S.S, M.Pd, Ph.D
NIP. 197001262000031002

Peneliti



Nurul Setianingrum, SE.,MM.
NIP. 196905231998032001